



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN



RENJA 2025



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dapat tersusun.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

Sejalan dengan Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, maka untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang selaras dengan karakteristik Kabupaten Nunukan guna Meningkatkan pembangunan serta pemeliharaan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur, tentunya bukan hanya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan melainkan perlunya motivasi dan dukungan dari lapisan masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut.

Tanpa mengurangi makna yang tersaji, maka kami berupaya menampilkan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025 yang menggambarkan tentang gambaran umum Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Program / Kegiatan dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan pada Tahun 2025.

Semoga Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025, dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

Nunukan, 9 Juli 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nunukan,

H. MUHAMMAD AMIN, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19721214 200112 1 003



DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i>	<i>i</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>ii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan 2021-2026	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2024	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2024	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	48
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan	50
3.3. Program dan Kegiatan	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	60
BAB V PENUTUP	61



4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);



8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);



35. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);
37. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 13).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

penyusunan Renja Dishub Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Dishub Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025 meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.



BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB V. PENUTUP, Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021-2026.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA PD Tahun Lalu adalah sebagai berikut :



Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)
Kabupaten Nunukan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
Perhubungan										
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100		100	81,42	81,42%	100	100	100%
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	100		100	100	100,00%	100	100	100%
2.15.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	100,00%	2	2	100%
2.15.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	5	3	3	100,00%	3	3	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	-	4	4	100,00%	4	4	100%
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		100	50	50,00%	100	100	100%
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	826		826	826	100,00%	826	826	100%
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100		100	0	0,00%	100	100	100%
2.15.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	220	0	75	0	0,00%	220	220	100%
2.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48	0	32	0	0,00%	36	36	100%
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100		100	98,63	98,53%	100	100	100%
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	5	5	5	100,00%	7	7	100%
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	12	12	12	100,00%	10	10	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	26	12	11	91,67%	30	30	100%
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11/12	12	9	9	100,00%	11	11	100%
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20/30	25	30	30	100,00%	20	20	100%
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		100	100	100,00%	100	100	100%
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100,00%	12	12	100%
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100,00%	12	12	100%
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		100	90	90,00%	100	100	100%
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6/5	3	5	5	100,00%	6	6	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	4	4	4	100,00%	5	5	100%
2.15.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1	-	1	0	0,00%	1	1	100%
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas lalu lintas dan angkutan jalan	24,00		21,43	21,43	100,00%	22,29	22,29	100%
		Rasio ijin trayek angkutan darat	0,000743		0,000871	0,00041	47,04%	0,000186	0,000186	100%
		Persentase layanan angkutan Darat	2,45		3,58	8,76	41,00%	3,26	3,26	100%
		Persentase kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor	89,29		75,55	69,76	92,00%	78,99	78,99	100%
		Persentase pemanfaatan terminal	100,00		50,00	50	100,00%	100,00	100,00	100%
		Persentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten	100,00		50,00	50	100,00%	62,50	62,50	100%
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penetapan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	100	0	0	0	0,00%	50	0	0%
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	-	0	0	0,00%	1	0	0%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	-	0	0	0,00%	0	0	#DIV/0!
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	-	0	0	0,00%	0	0	#DIV/0!
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan	8		4	4	100,00%	5	5	100%
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1		1	1	100,00%	1	1	100%
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2		2	2	100,00%	2	2	100%
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1		1	1	100,00%	2	2	100%
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	200		100	100	100,00%	200	200	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal yang aktif	2		1	0	0,00%	2	2	100%
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	0		0	0	0,00%	1	1	100%
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	0		0	0	0,00%	0	0	#DIV/0!
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	0		0	0	0,00%	1	1	100%
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2		0	0	0,00%	2	2	100%
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yg diuji KIR	664		562	519	92,35%	588	588	100%
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1		1	2	200,00%	1	1	100%
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	550		550	371	67,45%	550	550	100%
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	550		550	0	0,00%	550	550	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1		1	1	100,00%	1	1	100%
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1		1	1	100,00%	1	1	100%
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	7		1	1	100,00%	7	7	100%
2.15.02.2.05.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2		2	2	100,00%	2	2	100%
2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1		1	1	100,00%	1	1	100%
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1		1	1	100,00%	1	1	100%
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100		100	100	100,00%	100	100	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2		2	2	100,00%	2	2	100%
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	3		3	3	100,00%	3	3	100%
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	16910		11550	44550	386,00%	12705	12705	100%
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5		5	5	100,00%	5	5	100%
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3		3	3	100,00%	3	3	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Trayek Angkutan Darat yang dikeluarkan	157		17	8	47,06%	37	37	100%
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	3		3	3	100,00%	3	3	100%
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio konektivitas lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan	35,00		30,00	30,00	100,00%	31,25	31,25	100%
		Rasio ijin trayek angkutan perairan	0,001183		0,000874	0,0001485	17,00%	0,000942	0,000942	100%
		Persentase layanan angkutan perairan	0,10		0,15	0,04	384,00%	0,14	0,14	100%
		Persentase prasarana perhubungan perairan yang dibangun	100,00		96,50	100	104,00%	96,50	96,50	100%
		Persentase prasarana perhubungan perairan yang direhab/ diperlihara	32,14		17,86	14,79	80,00%	21,43	21,43	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Produktifitas Penumpang Angkutan Perairan	348076		237741	912793	384,00%	261515	261515	100%
2.15.03.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2		2	2	100,00%	2	2	100%
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Trayek Angkutan Perairan yang dikeluarkan	250		171	29	17,00%	188	188	100%
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3		3	3	100,00%	3	3	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Prasarana Perhubungan Perairan yang dibangun	29		28	29	104,00%	28	28	100%
		Jumlah Kebutuhan Prasarana Perhubungan Perairan yang direhab atau dipelihara	100		100	80	80,00%	100	100	100%
2.15.03.2.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	0		3	0	0,00%	1	1	100%
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	0		0	0	0,00%	0	0	#DIV/0!
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	8		5	4	80,00%	5	5	100%
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pelabuhan Sungai yang diawasi	1		0	0	0,00%	1	1	100%



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Sesuai Tujuan Dinas Perhubungan yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Perhubungan tahun 2021-2026 maka hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel. II.2

Rencana STRATEGIS Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya infrastruktur transportasi di wilayah Perbatasan			1 Rasio konektivitas kabupaten	51,43	53,54	55,64	57,75	59,00
		1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana transportasi di wilayah Perbatasan	1 Rasio konektivitas lalu lintas dan angkutan jalan (IK1)	21,43	22,29	23,14	24,00	24,00
				2 Rasio konektivitas lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan (IK2)	30,00	31,25	32,50	33,75	35,00

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan sesuai dengan RENSTRA Dinas Perhubungan tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :



Tabel II.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Nunukan

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Rasio konektivitas kabupaten	-	-	51,43	53,54	55,64	57,75	59,00	42,93	51,43		51,43	53,54	55,64	-
2	Rasio konektivitas lalu lintas dan angkutan jalan (IK1)	-	-	21,43	22,29	23,14	24	24	20,57	21,43		21,43	22,29	23,14	-
3	Rasio konektivitas lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan (IK2)	-	-	30,00	31,25	32,50	33,75	35,00	22,36	30,00		30,00	31,25	32,50	-
4	Rasio ijin trayek angkutan darat	-	-	0,000087	0,000186	0,000330	0,000516	0,000743	0,0000366	0,000041		0,000087	0,000186	0,000330	-
5	Persentase layanan angkutan Darat	-	-	3,58	3,26	2,96	2,69	2,45	3,94	8,76		3,58	3,26	2,96	-
6	Persentase kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor	-	-	75,55	78,99	82,42	85,85	89,29	68,68	68,68		75,55	78,99	82,42	-
7	Persentase pemanfaatan terminal	-	-	50	100	100	100	100	50	50		50	100	100	-



NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	Persentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten			50	62,5	75	87,5	100	12,5	50		50	62,5	75	-
9	Rasio ijin trayek angkutan perairan			0,000874	0,000942	0,001016	0,001096	0,001183	0,000750	0,000149		0,000874	0,000942	0,001016	-
10	Persentase layanan angkutan perairan			0,15	0,14	0,13	0,11	0,10	0,11	0,04		0,15	0,14	0,13	-
11	Persentase prasarana perhubungan perairan yang dibangun			96,5	96,5	96,5	96,5	100	96,5	100		96,5	96,5	96,5	-
12	Persentase prasarana perhubungan perairan yang direhab/ diperlihara			17,86	21,43	25	28,57	32,14	17,86	14,29		17,86	21,43	25	-



2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN.

2.3.1 Tingkat Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

Kemudian pada RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 ditetapkan 1 Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 2 indikator utama yaitu :

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana transportasi di wilayah Perbatasan;
 - a) Rasio konektivitas lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) Rasio konektivitas lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Permasalahan sektor perhubungan di Kabupaten Nunukan ditimbulkan oleh berbagai faktor ataupun beberapa faktor yang saling berkaitan. Sebagian besar terkait rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Kabupaten Nunukan.



Adapun pokok-pokok permasalahan disektor perhubungan yang berhasil teridentifikasi adalah:

- 1) Terbatasnya prasarana transportasi, permasalahan ini dipengaruhi oleh :
 - a) Luasnya wilayah Kabupaten Nunukan dengan kondisi geografis yang terdiri dari banyak sungai dan dataran tinggi, sehingga sangat mempengaruhi kemampuan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penyediaan prasarana transportasi yang baik;
 - b) Biaya penyediaan lahan dan status lahan yang belum jelas.

- 2) Terbatasnya sarana transportasi, permasalahan ini dipengaruhi oleh :
 - a) Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi;
 - b) Manajemen pengelola transportasi masih konvensional;
 - c) Penyebaran penduduk yang tidak merata.

- 3) Sistem layanan transportasi yang belum memadai, permasalahan ini dipengaruhi oleh :
 - a) Belum adanya kajian rencana induk jaringan transportasi lalu lintas angkutan jalan;
 - b) Belum adanya kajian rencana induk fasilitas keselamatan (Faskes);
 - c) Belum tersedianya sistem informasi transportasi berbasis aplikasi.

- 4) SDM Transportasi yang masih kurang, permasalahan ini dipengaruhi oleh :
 - a) Minimnya personil yang memiliki sertifikasi;
 - b) Penempatan personil yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan latar belakang pendidikan bidang transportasi;
 - c) Tidak adanya formasi jabatan bidang transportasi.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 tercantum bahwa **Visi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan** periode 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang aman, maju, adil dan sejahtera”



Dinas Perhubungan dalam hal ini mengemban tugas dan menjalankan fungsi untuk mendukung Visi tersebut diatas melalui **Misi Kedua** yaitu :

“Meningkatkan infrastrulrtur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi”

Misi ini dijelaskan sebagai berikut :

Ketersediaan infrastruktur memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sebagai salah satu penggerak roda pertumbuhan ekonomi daerah, oleh karena itu pada periode 2021-2026 pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada dua kerangka utama yaitu infrastrukhrr untuk memenuhi pelayanan dasar dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya infrastruktur yang memadai dan saling terintegrasi satu sama lainnya dalam mendukung pengembangan sektor-sektor yang lainnya serta adanya akselerasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nunukan akan dapat membawa malfaat yang lebih besar pada pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Dinas Perhubungan ikut mendukung **Tujuan Pertama** dari **Misi Kedua** tersebut diatas yaitu ***Meningkatkan infrastrulrtur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan Sasaran Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah.*** Hal ini dilaksanakan dengan ***Strategi Meningkatnya infrastruktur transportasi di wilayah Perbatasan*** Adapun **Arah Kebijakan** yang diambil adalah melaksanakan Pembangunan dan peningkatan prasarana perhubungan, Rehabilitasi prasarana perhubungan, Peningkatan aksesibilitas layanan angkutan umum di desa yang masih tertinggal dan Penyediaan subsidi ongkos angkut penumpang di desa yang masih tertinggal.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam usaha pencapaiannya Dinas Perhubungan memiliki dinamika tantangan dan peluang pembangunan sebagai berikut :



Tabel. II.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang aman, maju, adil dan sejahtera				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 2 : Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Terbatasnya Prasarana Transportasi	Letak Geografis yang bercirikan kepulauan dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia	Adanya kebijakan pemerintah dalam percepatan pembangunan transportasi di wilayah perbatasan
2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	2. Terbatasnya sarana transportasi	Penyebaran penduduk yang tidak merata dan aksesibilitas jalan yang belum memadai	Kebijakan pemerintah dalam pengembangan jaringan transportasi di wilayah perbatasan
3	Program pengelolaan pelayanan	3. Sistem layanan transportasi	Kualitas pelayanan transportasi masih rendah	Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap layanan publik pada Sektor perhubungan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan
		4. SDM Transportasi	Kurangnya minat penyedia jasa transportasi mengikuti program pendidikan dan pelatihan	Adanya program pemerintah dalam pemberdayaan sumber daya masyarakat penyedia jasa transportasi

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) / Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan PD Dinas Perhubungan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) / Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) dapat dilihat pada Tabel II.5



Tabel. II.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN NUNUKAN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)		(3)	(4)	(5)		(7)		(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
2.15.01	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</i>	Kab. Nunukan	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100	Persen	13.129.469.491	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</i>	Kab. Nunukan	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100	Persen	13.704.457.117	
2.15.01.1.01	Perencanaan, Pangggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	Persentase Kegiatan Perencanaan, Pangggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	100	%	69.312.980	Perencanaan, Pangggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	Persentase Kegiatan Perencanaan, Pangggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	100	%	107.704.350	
2.15.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	44.165.475	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokume n	59.750.000	



Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)		(3)	(4)	(5)		(7)		(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
2.15.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	9.846.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	12.165.850	
2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	15.301.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	35.788.500	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	5.587.493.911	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	6.012.071.380	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	826	Orang/bulan	5.587.493.911	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	826	Orang / bulan	6.012.071.380	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	176.354.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	108.179.800	



Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)		(3)	(4)	(5)		(7)		(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
2.15.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	0	
2.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	Orang	176.354.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	Orang	108.179.800	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	981.276.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	985.355.450	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Paket	11.158.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Paket	15.000.000	
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	326.118.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	326.118.800	
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	Paket	190.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	Paket	397.236.650	



Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)		(3)	(4)	(5)		(7)		(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11	Paket	206.999.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	Paket	0	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	247.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	247.000.000	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nunukan	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	5.951.481.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nunukan	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	5.842.307.717	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.503.181.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.518.120.000	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4.448.300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4.324.187.717	



Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)		(3)	(4)	(5)		(7)		(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Kab. Nunukan	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	363.551.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Kab. Nunukan	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	648.838.420	
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	291.185.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	221.185.060	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	72.365.900	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	138.373.400	
2.15.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	0	Unit	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	1	Unit	289.279.960	



Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)		(3)	(4)	(5)		(7)		(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
2.15.02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Nunukan	Rasio konektivitas lalu lintas dan angkutan jalan	23,14	Rasio	2.604.913.125	PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Nunukan	Rasio konektivitas lalu lintas dan angkutan jalan	23,14	Rasio	3.656.769.215	
			Rasio ijin trayek angkutan darat	0,00033 0	Rasio				Rasio ijin trayek angkutan darat	0,00033 0	Rasio		
			Persentase layanan angkutan Darat	2,96	Persen				Persentase layanan angkutan Darat	2,96	Persen		
			Persentase kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor	82,42	Persen				Persentase kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor	82,42	Persen		
			Persentase pemanfaatan terminal	100,00	Persen				Persentase pemanfaatan terminal	100,00	Persen		
			Persentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten	75,00	Persen				Persentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten	75,00	Persen		
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/K ota	Kab. Nunukan	Persentase Jumlah Penetapan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	100	Persen	90.000.000	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/K ota	Kab. Nunukan	Persentase Jumlah Penetapan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	100	Persen	1.000.000.000	



Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)		(3)	(4)	(5)		(7)		(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Ko ta		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	Dokumen	0	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Ko ta		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Dokume n	1.000.000.000	
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Ko ta		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Dokumen	50.000.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Ko ta		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	Dokume n	0	
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Ko ta		Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Laporan	40.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Ko ta		Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	Laporan	0	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota	Kab. Nunukan	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan	4	Jenis	1.662.614.306	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota	Kab. Nunukan	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan	4	Jenis	1.662.614.306	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1	Unit	100.000.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1	Unit	100.000.000	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	Unit	412.614.306	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	Unit	412.614.306	



Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)		(3)	(4)	(5)		(7)		(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1	Unit	50.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1	Unit	50.000.000	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	200	Unit	1.100.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	200	Unit	1.100.000.000	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Nunukan	Jumlah terminal yang aktif	2	Unit	300.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Nunukan	Jumlah terminal yang aktif	2	Unit	300.000.000	
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	0	Dokumen	0	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	0	Dokumen	0	
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal		Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1	Unit	200.000.000	Pembangunan Gedung Terminal		Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1	Unit	200.000.000	
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	0	Unit	0	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	0	Unit	0	



Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)		(3)	(4)	(5)		(7)		(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2	Unit	100.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2	Unit	100.000.000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Nunukan	Jumlah kendaraan yg diuji KIR	613	Unit	164.029.700	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Nunukan	Jumlah kendaraan yg diuji KIR	613	Unit	194.029.700	
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Orang	15.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Orang	25.000.000	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	550	Unit	15.000.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	550	Unit	15.000.000	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	550	Dokumen	25.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	550	Dokumen	25.000.000	



Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)		(3)	(4)	(5)		(7)		(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Laporan	15.000.000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Laporan	15.000.000	
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1	Laporan	15.000.000	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1	Laporan	15.000.000	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	7	Unit	25.905.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	7	Unit	25.905.000	
2.15.02.2.05.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	Laporan	23.124.700	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	Laporan	43.124.700	



Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)		(3)	(4)	(5)		(7)		(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Laporan	10.000.000	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	Laporan	0	
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Laporan	20.000.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Laporan	30.000.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	%	44.000.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	%	119.171.240	
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	17.000.000	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	17.000.000	



Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)		(3)	(4)	(5)		(7)		(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	3	Laporan	27.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	3	Laporan	102.171.240	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	13976	Orang	294.269.119	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	13976	Orang	294.269.119	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5	Unit	249.269.119	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5	Unit	249.269.119	



Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)		(3)	(4)	(5)		(7)		(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	Laporan	45.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	Laporan	45.000.000	
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan	Jumlah Ijin Trayek Angkutan Darat yang dikeluarkan	67	Ijin	50.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan	Jumlah Ijin Trayek Angkutan Darat yang dikeluarkan	67	Ijin	86.684.850	
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Laporan	86.684.850	



Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)		(3)	(4)	(5)		(7)		(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kab. Nunukan	Rasio konektivitas lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan	32,50	Rasio	2.350.909.500	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kab. Nunukan	Rasio konektivitas lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan	32,50	Rasio	2.444.418.820	
			Rasio ijin trayek angkutan perairan	0,00101 6	Rasio				Rasio ijin trayek angkutan perairan	0,00101 6	Rasio		
			Persentase layanan angkutan perairan	0,13	Persen				Persentase layanan angkutan perairan	0,13	Persen		
			Persentase prasarana perhubungan perairan yang dibangun	96,50	Persen				Persentase prasarana perhubungan perairan yang dibangun	96,50	Persen		
			Persentase prasarana perhubungan perairan yang direhab/ diperlihara	25,00	Persen				Persentase prasarana perhubungan perairan yang direhab/ diperlihara	25,00	Persen		



Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)		(3)	(4)	(5)		(7)		(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Kab. Nunukan	Jumlah Produktifitas Penumpang Angkutan Perairan	287666	Orang	927.810.900	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Kab. Nunukan	Jumlah Produktifitas Penumpang Angkutan Perairan	287666	Orang	990.670.300	
2.15.03.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2	Dokumen	927.810.900	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2	Dokumen	990.670.300	



Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)		(3)	(4)	(5)		(7)		(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan	Jumlah Ijin Trayek Angkutan Perairan yang dikeluarkan	206	Ijin	73.098.600	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan	Jumlah Ijin Trayek Angkutan Perairan yang dikeluarkan	206	Ijin	103.748.500	
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	Laporan	73.098.600	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	Laporan	103.748.500	



Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)		(3)	(4)	(5)		(7)		(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Nunukan	Jumlah Prasarana Perhubungan Perairan yang dibangun	28	Unit	1.350.000.000	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Nunukan	Jumlah Prasarana Perhubungan Perairan yang dibangun	28	Unit	1.350.000.020	
		Kab. Nunukan	Jumlah Kebutuhan Prasarana Perhubungan Perairan yang direhab atau dipelihara	100	%			Kab. Nunukan	Jumlah Kebutuhan Prasarana Perhubungan Perairan yang direhab atau dipelihara	100	%		
2.15.03.2.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1	Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1	Dokumen	100.000.000	
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	0	Unit	0	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	0	Unit	0	



Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)		(3)	(4)	(5)		(7)		(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	6	Unit	1.200.000.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	6	Unit	1.200.000.000	
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Laporan Pelabuhan Sungai yang diawasi	1	Laporan	50.000.000	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Laporan Pelabuhan Sungai yang diawasi	1	Laporan	50.000.020	



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Pada forum OPD terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan selaku OPD Teknis dari kelompok Masyarakat melalui Camat masing-masing wilayah. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Terhadap beberapa usulan program kegiatan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan anggaran PD yang masih terbatas, sehingga tidak semua usulan dapat terakomodir namun dipertimbangkan untuk diusulkan melalui dana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.



Tabel. II.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Nunukan

TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN / DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD
09-01-2023	ARIEF RACHMADI,SSTP	Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota "	Nunukan Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-
10-01-2023	MARDIN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sungai Limau	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-
12-01-2023	UDIN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Srinanti	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk di bahas di Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-
12-01-2023	ARIEF RACHMADI,SSTP	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Selisun	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas di musrenbang kecamatan dan lengkapi foto lokasinya	-	-	-	-
12-01-2023	ARIEF RACHMADI,SSTP	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Selisun	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk di bahas di musrenbang kecamatan dan lengkapi foto lokasinya	-	-	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN



TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN / DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD
12-01-2023	ARIEF RACHMADI,SSTP	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Selisun	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk di bahas di musrenbang kecamatan	-	-	-	-
12-01-2023	ARIEF RACHMADI,SSTP	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Selisun	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas di musrenbang kecamatan dan lengkapi foto lokasi	-	-	-	-
12-01-2023	ARIEF RACHMADI,SSTP	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Selisun	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas di musrenbang kecamatan, foto lokasi dilengkapi	-	-	-	-
12-01-2023	ARIEF RACHMADI,SSTP	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Selisun	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas di musrenbang kecamatan	-	-	-	-
13-01-2023	ELSO L	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Tanjung Hulu	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas di musrenbang kecamatan, lengkapi foto lokasi	-	-	-	-
13-01-2023	CHARLES	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pulu Bulawan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas lebih lanjut di musrenbang kecamatan dan lengkapi foto lokasinya	-	-	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN



TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN / DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD
14-01-2023	RUSTAMAJI	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Ubol Alung	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas di musrenbang kecamatan dan foto lokasi dilengkapi	-	-	-	-
14-01-2023	PERI	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Tukulon	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas di musrenbang kecamatan dan lengkapi foto lokasi	-	-	-	-
14-01-2023	NASUTION	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Taluan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas lebih lanjut di musrenbang kecamatan, dan dilengkapi foto lokasi	-	-	-	-
14-01-2023	YOGIN	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Sapuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diterima dan diteruskan untuk dibahas di Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-
14-01-2023	LINTAS	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Liang	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas lebih lanjut di musrenbang kecamatan serta foto laksinya dilengkapi	-	-	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN



TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN / DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD
14-01-2023	CISADA	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Nainsid	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	dibahas lebih lanjut dimusrenbang kecamatan	-	-	-	-
14-01-2023	FRENDY EFFENDY	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kalampising	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas lebih lanjut di musrenbang kecamatan	-	-	-	-
14-01-2023	BALUKANG	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Sasibu	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas lebih lanjut di musrenbang kecamatan serta lengkapi foto lokasinya	-	-	-	-
14-01-2023	UDIN	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Srinanti	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan untuk di bahas di Musrenbang Kecamatan	-	Dermaga SP II sangat memerlukan rehab agar memudahkan masyarakat dalam proses bokarmuat barang dan naik dan turunnya penumpang	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN



TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN / DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD
15-01-2023	Gilimin	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Batung	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas di musrenbang kecamatan dan lengkapi foto lokasi	-	-	-	-
16-01-2023	SYARIFUDDIN	Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota "	Aji Kuning	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk di bahas di Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-
16-01-2023	SYARIFUDDIN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Aji Kuning	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan untuk di bahas di Musrenbang Kecamatan	-	Sebagai salah satu jalan poos yang sering diawasi penyedian rambu-rambu lalulintas menjadi prioritas untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalulintas	-	-
16-01-2023	SYARIFUDDIN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Aji Kuning	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas di musrenbang kecamatan serta lengkapi foto lokasinya	-	-	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN



TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN / DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD
17-01-2023	LEORNADOS MARIO ISKANDAR, S.STP	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Nunukan Tengah	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas di musrenbang kecamatan serta foto lokasi dilengkapi	-	-	-	-
18-01-2023	AKHMAD MULYADI,S.STP	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Mansapa	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas di musrenbang kecamatan	-	-	-	-
18-01-2023	BUKEL	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Podong	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas lebih lanjut di musrenbang kecamatan, dan lengkapi foto lokasinya	-	-	-	-
19-01-2023	AKHMAD MULYADI,S.STP	Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Mansapa	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas lebih lanjut di musrenbang kecamatan, foto lokasi dilengkapi	-	-	-	-
19-01-2023	AKHMAD MULYADI,S.STP	Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Mansapa	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas lebih lanjut di musrenbang kecamatan, foto lokasi dilengkapi	-	-	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN



TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN / DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD
19-01-2023	AKHMAD MULYADI,S.STP	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Mansapa	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas lebih lanjut di musrenbang kecamatan, foto lokasi dilengkapi	-	-	-	-
19-01-2023	AKHMAD MULYADI,S.STP	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Mansapa	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Dikembalikan	untuk penambahan tiang listrik kewenangan ada di Provinsi, di Dinas Pertambangan dan Energi	kalau penambahan tiang listrik itu kewenangan ada di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi (Kewenangan Provinsi), kalau penerangan lampu jalan di Dinas Perhubungan	-	-	-	-
19-01-2023	AKHMAD MULYADI,S.STP	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Mansapa	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Dikembalikan	untuk penambahan tiang listrik kewenangan ada di Provinsi, di Dinas Pertambangan dan Energi	-	-	-	-	-
19-01-2023	Zuljiansyah, S.I.P	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Nunukan Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas di musrenbang kecamatan	-	-	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN



TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN / DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD
19-01-2023	Zuljiansyah, S.I.P	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Nunukan Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Dikembalikan	kamus usulan dan permasalahan tidak relevan, perbaiki	ditindaklanjuti di musrenbang kecamatan	-	-	-	-
19-01-2023	Zuljiansyah, S.I.P	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Nunukan Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Dikembalikan	kamus usulan dan permasalahan tidak relevan, perbaiki	ditindaklanjuti di musrenbang kecamatan	-	-	-	-
19-01-2023	RAHMAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lapri	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diterima dan diteruskan untuk dibahas di musrenbang kecamatan serta lengkapi foto lokasinya	-	Sangat diperlukan untuk penerangan jalan yang selama ini gelap gulita.	-	-
19-01-2023	Zuljiansyah, S.I.P	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Nunukan Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	untuk dibahas lebih lanjut di musrenbang kecamatan	-	-	-	-
19-01-2023	Zuljiansyah, S.I.P	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Nunukan Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diterima untuk dibahas di musrenbang kecamatan	-	-	-	-
19-01-2023	Zuljiansyah, S.I.P	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Nunukan Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diterima untuk dibahas di musrenbang kecamatan	-	-	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN



TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN / DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD
19-01-2023	Juen	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pa' Rupai	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diteruskan untuk dibahas di musrenbang kecamatan (usulan prioritas 1 hasil musrenbang desa)	-	Di rekomendasikan sebagai usulan Prioritas Desa untuk ditindaklanjuti ke Dinas Perhubungan	-	-
20-01-2023	MOPOR	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Duyan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas di musrenbang kecamatan dan lengkapi foto lokasinya	-	-	-	-
20-01-2023	KALVIANUS KILIP UKUNG	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Tetagas	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diteruskan untuk dibahas di musrenbang kecamatan, foto lokasi dilengkapi	-	-	-	-
20-01-2023	BRIYAN GAVIN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pa' Kaber	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	untuk dibahas di musrenbang kecamatan	-	P2	-	-
20-01-2023	SEPRI JOHAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pa' Lutut	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	untuk dibahas di musrenbang kecamatan	-	P1	-	-
25-01-2023	ANIEF ARIFANTO, S.A.P.,M.I.Kom	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Nunukan Utara	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	diterima dan diteruskan ke tahapan selanjutnya	-	-	-	-



NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD
1	160406	21-02-2023	LEWI, S.Sos	Pengelolaan Pelayaran	Diperlukan pembangunan Dermaga beton sebagai fasilitas pendukung dari rencana Pengembangan wilayah Pelabuhan dalam Kecamatan, yang dapat mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sekitarnya dan dapat mengakumulasi aktivitas ekonomi	Desa Sinampila II Kecamatan Lumbis Ogosng, Kab. Nunukan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	Pembangunan dermaga di desa sinampila	-	-	-
2	209664	27-02-2023	LEWI, S.Sos	Pengelolaan Pelayaran	Belum tersedianya tambatan perahu untuk warga desa	RT. 02 desa Sasibu Kematan Lumbis, Kab. Nunukan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	pembuatan tambatan perahu di RT. 02 desa Sasibu Kematan Lumbis	-	-	-
3	213593	27-02-2023	HENDRAWAN, S.Pd	Pengelolaan Pelayaran	Hingga saat ini belum ada dermaga untuk tambatan perahu bagi warga.	Kecamatan Lumbis Hulu, Kab. Nunukan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	pembangunan dermaga tambatan perahu di Kecamatan lumbis hulu	-	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN



NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD
4	298569	07-03-2023	TRI WAHYUNI	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	meembuat badan jalan Desa sehingga akses masyarakat ada	Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku, Kab. Nunukan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	-	Validasi Mitra Bappeda	-	pembuatan badan jalan di Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku	-	-	-
5	336410	10-03-2023	HJ. NADIA	Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	JALAN SULIT DILALUI	JALAN USAHA TANI RT. 09 DAN RT. 12 DESA TANJUNG ARU, SEBATIK TIMUR, Kab. Nunukan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	Validasi Mitra Bappeda	-	Perbaikan jalan di jl. Usaha tani RT. 09 dan RT 12 di desa tanjung aru sebatik timur	-	-	-



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan infrastruktur sektor transportasi merupakan bagian dari pembangunan Nasional dikarenakan infrastruktur transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan transportasi merupakan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan juga sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Pembangunan sektor transportasi dengan skala Nasional terakomodir dalam Dokumen Tatanan Transportasi Nasional (TATRANAS) yang implementasi dan terjabarkan dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan RI. Peranan Renstra Kementerian Perhubungan RI merupakan landasan dan pedoman dalam mewujudkan keselarasan pembangunan di Daerah (Provinsi/Kab/Kota). Dalam tataran Regional Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dalam merencanakan dan membuat program kegiatan sektor transportasi Regional Kabupaten Nunukan kurun 5 (lima) tahun kedepan 2021-2026, berpedoman pada Dokumen Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Kabupaten Nunukan yang merupakan amanah dari TATRANAS, RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI dan RPJMN. Mendasari kondisi tersebut Kementerian Perhubungan RI dengan Visinya **“Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”** dengan Misinya :

- a) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan;
- c) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM



operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;

- d) Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
- e) Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan tersebut, bahwa terdapat faktor-faktor penghambat dari pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 antara lain :

- 1) Letak Geografis yang bercirikan kepulauan dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia;
- 2) Penyebaran penduduk yang tidak merata dan aksesibilitas jalan yang belum memadai;
- 3) Kualitas pelayanan transportasi masih rendah;
- 4) Kurangnya minat penyedia jasa transportasi mengikuti program pendidikan dan pelatihan.

Sedangkan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 antara lain :

- 1) Adanya kebijakan pemerintah dalam percepatan pembangunan transportasi di wilayah perbatasan;
- 2) Kebijakan pemerintah dalam pengembangan jaringan transportasi di wilayah perbatasan;
- 3) Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap layanan publik pada Sektor perhubungan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
- 4) Adanya program pemerintah dalam pemberdayaan sumber daya masyarakat penyedia jasa transportasi.



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Hubungan yang selaras antara Renja dan Rentra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 yaitu:

a. Tujuan

Meningkatnya infrastruktur transportasi di wilayah Perbatasan.

b. Sasaran

- 1) Meningkatkan Sarana dan Prasarana transportasi di wilayah Perbatasan.

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025, Program dan Kegiatan tahun 2025 disusun berdasarkan :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Nunukan;
- b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;
- c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Dinas Perhubungan.

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026 direncanakan berjumlah 3 (Tiga) Program, 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub. Kegiatan yang sebagian besar merupakan Program dan Kegiatan bersifat operasional dan berkenaan dengan belanja modal untuk kegiatan Fisik dimungkinkan diakomodir pada anggaran APBN dan APBD I, Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dan Bantuan Keuangan (Bankeu).



Tabel. III.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Nunukan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Kab. Nunukan	100	Persen	13.704.457.117	APBD II	
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Kab. Nunukan	100	%	107.704.350		
2.15.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	Dokumen	59.750.000		
2.15.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3	Laporan	12.165.850		
2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	Laporan	35.788.500		
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	100	%	6.012.071.380		
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		826	Orang/bulan	6.012.071.380,26		



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	100	%	108.179.800		
2.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		40	Orang	108.179.800		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	100	%	985.355.450		
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		7	Paket	15.000.000		
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10	Paket	326.118.800		
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		30	Paket	397.236.650		
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20	Laporan	247.000.000		
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nunukan	100	%	5.842.307.717		
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	Laporan	1.518.120.000		
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	Laporan	4.324.187.717		



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nunukan	100	%	648.838.420		
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6	Unit	221.185.060		
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5	Unit	138.373.400		
2.15.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	289.279.960		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio ijin trayek angkutan darat	Kab. Nunukan	23,14	Rasio	3.656.769.215	APBD II	
	Persentase layanan angkutan Darat		0,000330	Persen				
	Persentase kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor		2,96	Persen				
	Persentase pemanfaatan terminal		82,42	Persen				
	Persentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten		100,00	Persen				



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penetapan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	Kab. Nunukan	100	Persen	1.000.000.000		
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		1	Dokumen	1.000.000.000		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan	Kab. Nunukan	6	Jenis	1.662.614.306		
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		1	Unit	100.000.000		
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		2	Unit	412.614.306		
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		1	Unit	50.000.000		
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		200	Unit	1.100.000.000		
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal yang aktif	Kab. Nunukan	2	Unit	300.000.000		
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun		0	Unit	200.000.000		
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara		0	Unit	100.000.000		



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yg diuji KIR	Kab. Nunukan	613	Unit	194.029.700		
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1	Orang	25.000.000		
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar		550	Unit	15.000.000		
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		550	Dokumen	25.000.000		
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1	Laporan	15.000.000		
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		1	Laporan	15.000.000		
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		7	Unit	25.905.000		
2.15.02.2.05.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		2	Laporan	43.124.700		



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1	Laporan	30.000.000		
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan	100	%	119.171.240		
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		2	Dokumen	17.000.000		
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		3	Laporan	102.171.240		
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	Kab. Nunukan	13976	Orang	294.269.119		
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		5	Unit	249.269.119		



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		3	Laporan	45.000.000		
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Trayek Angkutan Darat yang dikeluarkan	Kab. Nunukan	67	Ijin	86.684.850		
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		3	Laporan	86.684.850		
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio ijin trayek angkutan perairan	Kab. Nunukan	0,001016	Rasio	2.444.418.820	APBD II	
		Persentase layanan angkutan perairan		0,13	Persen			
		Persentase prasarana perhubungan perairan yang dibangun		96,50	Persen			
		Persentase prasarana perhubungan perairan yang direhab/ dipelihara		25,00	Persen			



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Produktifitas Penumpang Angkutan Perairan	Kab. Nunukan	287666	Orang	990.670.300		
2.15.03.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		2	Dokumen	990.670.300		
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Trayek Angkutan Perairan yang dikeluarkan	Kab. Nunukan	206	Ijin	103.748.500		
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		3	Laporan	103.748.500		



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Prasarana Perhubungan Perairan yang dibangun	Kab. Nunukan	29	Unit	1.350.000.020		
		Jumlah Kebutuhan Prasarana Perhubungan Perairan yang direhab atau dipelihara	Kab. Nunukan	100	%			
2.15.03.2.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan		1	Dokumen	100.000.000		
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara		6	Unit	1.200.000.000		
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pelabuhan Sungai yang diawasi		1	Laporan	50.000.020		



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub. kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Dinas Perhubungan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub. kegiatan tahunan.

Program, kegiatan dan sub. kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 yang telah disajikan pada Tabel III.1, penyajian program, kegiatan dan sub. kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi Dinas Perhubungan yang menjadi kewenangan, selain itu disajikan pula usulan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Pusat dengan mengharapkan bantuan alokasi dana dari APBD I dan APBN/DAK 2025.



BAB V

PENUTUP

RENJA Dinas Perhubungan Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026. RENJA Dinas Perhubungan Tahun 2025 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Nunukan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2025. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Dinas Perhubungan Tahun 2025 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2025.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Perhubungan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien.
2. RENJA Dinas Perhubungan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2025, dimana RENJA Dinas Perhubungan Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, seluruh aparatur Dinas Perhubungan secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan Tahun 2025.



4. Tata cara penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.